SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 172

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 172 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai wujud dalam penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri atas Bab. I Pendahuluan, Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daeah serta Bab. V Penutup. Berkenaan dengan itu, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja Tahun anggaran 2025, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bandung, Juli 2025

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Daftar Isi..... 2

Daftar Tabel 3

Bab. I : Pendahuluan..... 4

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud Tujuan..... 9

1.4. Sistematika Penulisan..... 10

Bab. II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024..... 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.. 12

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024..... 28

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial..... 32

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 38

Bab. III : Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial..... 60

3.1. Tujuan dan Sasaran..... 60

a. Tujuan..... 60

b. Sasaran..... 60

3.2. Kebijakan..... 61

3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan..... 62

Bab. IV : Rencana Kerja dan Pendaan Dinas Sosial..... 77

Bab. V : Penutup..... 85

Daftar Tabel

Tabel 2.2.1	Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial Tahu 2024.....	13
Tabel 2.2.2	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	14
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun lalu dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024.....	19
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	29
Tabel 2.2.3	Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Dilakukan Perubahan Tahun Anggaran 2024.....	39
Tabel T-C. 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025.....	44
Tabel T-C. 32	Usulan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2025.....	53
Tabel 3.3.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	63
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	66
Tabel 5.5.1	Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021 s.d 2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu dan merealisasikan seluruh pencapaian realisasi kinerja yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 berupaya untuk merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung untuk tahun 2024-2026 yang termasuk didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup sisi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung merupakan Dinas Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang keberadaan kelembagaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial yang didalamnya menerangkan bahwa Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang

Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang Pelaksana Teknis Daerah yang menangani masalah internal dinas. Bidang teknis dalam Dinas Sosial Kabupaten Bandung diantaranya adalah :

1. Bidang Penanganan Bencana
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Selain itu, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Keterlantaran dan Disabilitas
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tuna Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, selain itu juga di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial di Wilayah Kabupaten Bandung. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 terutama bidang pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 29);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, agar tetap selaras dengan perubahan kebijakan, dinamika pembangunan daerah, dan

hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Renja Perubahan ini menjadi dokumen operasional yang memuat penyesuaian target, sasaran, dan strategi dalam rangka mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.3.1.Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 untuk menjamin adanya keselarasan dan kesinambungan perencanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan program yang teetuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap penurunan beban penduduk miskin untuk periode Tahun 2023 -2026 yang menjadi sasaran terutama di sektor pembangunan kesejahteraan bidang sosial.

1.3.2.Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

1) Untuk memenuhi kebutuhan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya layanan wajib dasar terhadap standar pelayanan minimal disabilitas, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, lanjut usia dan anak terlantar dalam panti serta korban bencana alam dan sosial.
2) Sebagai rancangan awal Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk miskin,
3) Sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial skala Nasional dan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
4) Sebagai instrumen pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 S.D BULAN JUNI 2024
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dan Tahun 2024 sampai dengan bulan juni 2024
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2023
2.3. Analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Kabupaten Bandung
a. Tujuan
b. Sasaran
3.2. Kebijakan
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KABUPATEN BANDUNG
BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 s.d bulan Juni 2025

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluhtiga milyar duaratus sembilanpuluh tigajuta delapan ratus tujuhribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah) yang dijabarkan dalam 6 (enam) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Kabupaten Bandung dan 1 (Satu) program rutinitas kantor yang terbagi dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050- 5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengalokasikan total anggaran Rp. 43.293.807983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah) setelah dilakukan pengembalian terhadap alokasi anggaran yang berpotensi silpa, dari total alokasi anggaran dimaksud dapat dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk belanja pegawai (gaji asn) sebesar Rp 10.008.411.247,- (Sepuluh Milyar Delapan Juta EmpatRatus sebelas ribu duaratus empatpuluh tujuh rupiah) dan untuk BELANJA OPERASI sebesar Rp. 33.285.396.736,- (tiga puluh tiga milyar duartus delapanpuluh lima juta tigaratus sembilan puluh enam ribu tujuhratus tigapuluh enam rupiah), dari total pagu sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp.40.769.127.543,- (empat puluh milyar tujuh ratus enampuuh sembilan juta seratus duapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh tiga rupiah),- atau 94,17% (sembilan empat koma satu tujuh), ini menunjukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung sangat serius dan berkomitmen penuh dalam merealisasikan anggaran serta tepat pada sasaran peningkatan kesejahteraan bidang sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel. 2.2.1

Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Bidang Pelaksana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.14.502.156.536	Sekretariat
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 5.248.223.360	Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 43.081.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 7.154.426.476	Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Bidang Pelaksana
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.14.057.576.417	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 2.054.319.690	Bidang Penangan Bencana
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 83.397.404	Bidang Pemberdayaan Sosial
Total Anggaran		**Rp.43.293.807.983**	

Dari total alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang terjabarkan pada 7 (tujuh) program, 15 (Limabelas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan dimaksud dapat terlihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.2

Tabel Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
01	02	03	04	05
	DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG	**43.293.807.983,00**	**40.769.127.543,00**	**94.17**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**14,502,156,536.00**	**13,258,589,707.00**	**91.42**
	Perencanaan,Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**99.318.600**	**81.825.000**	**82.39**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.233.600,00	79.740.000,00	86,15
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	525.000,00	525.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	525.000,00	525.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	525.000,00	525.000,00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510.000,00	510.000,00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.008.411.247**	**9.251.294.960**	**92,44**
	Penyedian Gaji dan Tunjangan	10.008.411.247	9.251.294.960	92,44
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. -	Rp. -	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. -	Rp. -	
	Administrasi Umum Peragkat Daerah	**856,010,790.00**	**722,163,088.00**	**84.36**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,245,490.00	13,503,200.00	70.16

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309,039,300.00	294,518,250.00	95.30
	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	18,816,000.00	18,718,700.00	99.48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,334,300.00	17,746,600.00	76.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	122,480,000.00	79,743,900.00	65.11
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,998,400.00	18,660,000.00	93.31
	Penyediaan Bahan/Material	34,608,000.00	23,650,000.00	68.34
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150,000,000.00	112,005,000.00	74.67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,900,000.00	123,807,438.00	89.78
	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	20,589,300.00	19,810,000.00	96.22
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**195,585,000.00**	**188,034,000.00**	**96.14**
	Pengadaan Mebel	195,585,000.00	188,034,000.00	96.14
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya			
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**2,262,441,899.00**	**2,141,945,941.00**	**94.67**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,850,000.00	5,500,000.00	94.02
	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290,908,015.00	224,732,924.00	77.25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,965,683,884.00	1,911,713,017.00	97.25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**1,080,389,000.00**	**873,326,718.00**	**80.83**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,330,000.00	13,529,759.00	31.96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizian Keendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319,695,000.00	188,154,912.00	58.85
	Pemeliharaan Mebel	Rp. -	Rp. -	#DIV/0!
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	99,430,000.00	57,500,000.00	57.83
	Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	498,934,000.00	496,595,048.00	99.53
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	120,000,000.00	117,546,999.00	97.96

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ kota	Rp. -	Rp. -	
	Koordinasi dan Singkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang	Rp. -	Rp. -	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahtweraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**5.248.223.360.oo**	**5.175.871.000.oo**	**98,62**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupatwen/Kota	1.113.575.740,oo	1.102.039.000,oo	98,96
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	. 425.353.740.,oo	424.963.000,oo	99,91
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.539.484.940,oo	2.481.216.000.oo	97,71
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	. 1.169.808.940.oo	1.167.653.000.oo	99,82
	Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp. -	Rp. -	00.00
	Program Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**43.708.100.oo**	**41.970.650.oo**	**97,42**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**43.708.100.oo**	**41.970.650.oo**	**97,42**
	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	43.708.100.oo	41.970.650.oo	**97,42**
	Program Rehabilitasi Sosial	**. 7.154.426.476,oo**	**. 6.992.365.297.oo**	**97,73**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**6.399.786.971.oo**	**. 6.250.502.952.oo**	**99,60**
	Penyediaan Permakanan	1.188.000.000,oo	1.163.741.150.oo	97,96
	Penyediaan Sandang	894.450.000,oo	801.710.487,oo	89,63
	Penyediaan Alat Bantu	255.069.300,oo	203.219.375.oo	79,67
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.140.000,oo	5.140.000,oo	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.534.859.500.oo	2.475.317.292.oo	97,65
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.033.980.000.oo	997.486.477.oo	96,47
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.580.000.oo	6.580.000.oo	100
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.180.000,oo	3.180.000,oo	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	24.750.000,oo	24.750.000,oo	100
	Pemberian Layanan Kedaruratan	557.098.171.oo	557.098.171.oo	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.500.000,oo	2.500.000,oo	100
	Pemberian Layanan Rujukan	9.860.000.oo	9.860.000.oo	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahtweraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**754.639.505,oo**	**741.862.345.oo**	**98,31**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	24.750.000,oo	24.750.000,oo	100
	Pemberian Layanan Kedaruratan	116.251.345.oo	116.251.345.oo	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4.499.500,oo	4.499.500,oo	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	607.418.660.oo	594.653.000.oo	97,90
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. -	Rp. -	0
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. -	Rp. -	0
	Pemberian Layanan Dukungan Rujukan	. 1.720.000.oo	. 1.720.000.oo	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**14.057.576.417.oo**	**13.289.589.174.oo**	**94.54**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota	**14.057.576.417.oo**	**13.289.589.174.oo**	**94.54**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	888.220.000.oo	844.290.00.oo	95,05
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota	. 450.257.115.oo	446.632.185.oo	19.93
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	. 12.753.419.302.oo	11.998.666.989.oo	94,08
	Program Penangan Bencana	**2.054.319.690.oo**	**1.929.775.198.oo**	**93.94**
	Peerlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**1.573.996.690.oo**	**1.449.452.198.oo**	**92,09**
	Penyediaan Permakanan	852.734.890.oo	789.388.200.oo	92,57
	Penyediaan Sandang	275.600.000.oo	254.038.478.oo	92,18
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	251.109.000.oo	238.611.519.oo	95.02
	Pelayanan Dukungan Psikososial	194.552.800.oo	167.414.00.oo	86,05
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan Bencana Kab/Kota	**480.323.000.oo**	**480.323.000.oo**	**100**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	30.000.000.oo	30.000.000.oo	100
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana	450.323.000.oo	450.323.000.oo	100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**83.397.404.oo**	**83.116.567.oo**	**99,66**
	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**83.397.404.oo**	**83.116.567.oo**	**99,66**
	Rehabilitasi Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.300.000.oo	48.028.167.oo	99,44
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.097.404.oo	35.088.400,oo	99,97

Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengalokasikan total anggaran Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dilakukan pengembalian terhadap alokasi anggaran yang berpotensi silpa, dari total alokasi anggaran dimaksud dapat dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk belanja pegawai (gaji ASN) sebesar Rp 10.008.411.247,- (Sepuluh Milyar Delapan Juta EmpatRatus sebelas ribu duaratus empatpuluh tujuh rupiah) dan untuk belanja operasi sebesar Rp. 33.285.396.736,- (tiga puluh tiga milyar duartus delapanpuluh lima juta tigaratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), dari total pagu sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp.40.769.127.543,- (empat puluh milyar tujuh ratus enampuuh sembilan juta seratus duapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh tiga rupiah),- atau 94,17% (sembilan empat koma satu tujuh), ini sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.524.680.440,- (dua milyar Limaratus duapuluh empat juta enamratus Delapanpuluh ribu Empat ratus empatpuluh empat rupiah),- atau 5,83% (lima koma delapan tiga persen). Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mencapai rata-rata sebesar (94,17%) hal ini menunjukkan effisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan demikian Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Tabel TC-29 (IG)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											
1.06.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**89.8**	**Nilai**	**77.50**	**78.50**	**80.10**	**102%**	**79.5**		**157.60**	**176%**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**100**	**Presentase**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**		**200%**	**2%**
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah	10	Dokumen	2	2	2	100%	2	1	5	50%
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	3	60%
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	0	2	40%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Dokumen	5	5	5	100%	5	2	12	48%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8	Laporan	2	2	2	100%	2	0	4	50%
1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1	0	0	#DIV/0!
1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	146	Data	0	0	0	#DIV/0!	146	0	0	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**		**Presentase**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		**200**	**#DIV/0!**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	46	46	46	100%	47	12	104	173%
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**100**	**Presentase**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**		**200**	**200%**
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan			0	0	0	#DIV/0!	65	0	0	#DIV/0!
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	325	Orang	0	0	0	#DIV/0!	65	0	0	0%
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**		**Presentase**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	0	**200**	**#DIV/0!**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan	130	Paket	26	26	26	100%	26	0	52	40%
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	89	Paket	21	21	21	100	3	0	42	47%
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10	Paket	34	34	34	100%	3	0	68	680%
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	30	Paket	6	6	6	100%	1	0	12	40%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	86	Paket	19	19	19	100%	3	0	38	44%
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	95	Dokumen	19	19	19	100%	19	0%	38	40%
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan	9	Paket	2	2	2	100%	2	0	4	44%
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	795	Laporan	159	159	159	100%	159	0	318	40%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	65	65	65	100%	65	0	130	130%
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20	Dokumen	1	1	1	100%	3	0	2	10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**		**Presentase**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**0**	**200**	**#DIV/0!**
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	39	Paket	9	9	9	100%	3	0	18	46%
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan	13	Unit	0	0	0	#DIV/0!	3	0	0	0%
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**		**Presentase**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**0**	**2**	**#DIV/0!**
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	10	Laporan	2	2	2	100%	1	1	5	50%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Laporan	12	12	12	100%	12	3	27	45%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Laporan	12	12	12	100%	12	3	27	45%
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**		**Presentase**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**0**	**2**	**#DIV/0!**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	Unit	1	1	1	100%	1	0	2	6%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110	Unit	22	22	22	100%	22	0	44	40%
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	51	Unit	0	0	0	#DIV/0!	12	0	0	0%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	125	Paket	25	25	25	100%	25	0	50	40%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15	Unit	3	3	3	100%	3	0	6	40%
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	Unit	2	2	2	100%	2	0	4	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos**		**Presentase**		**65.06**	**68.25**	**105%**	**53.98**	**0**	**68.25**	**#DIV/0!**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial**		**Presentase**		**0%**	**0%**	**#DIV/0!**	**48.61**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	25	Dokumen	0	42	0	0%	50	0	0	0%
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial**		**Presentase**	**%**	**1551**	**535**	**34%**	**59.35**	**0**	**#VALUE!**	**#VALUE!**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Poten Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	3,930	Orang	684	442	442	100%	144	0	1126	29%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potense Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota.	155	Orang	31	31	31	100%	31	31	93	60%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatanan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota	2855	Keluarga	571	458	458	100%	571	0	1029	36%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatanan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Lembaga	3	578	578	100%	72	0	581	3873%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga () LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi.	20	Orang	0	0	0	#DIV/0!	5	0	0	0%
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal**		**Presentase**		**37.79**	**37.79**	**100%**	**100**	**0**	**37.79**	**#DIV/0!**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Kdaerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		**Presentase**		**37.79**	**37.79**	**100%**	**38.12**	**0**	**37.79**	**#DIV/0!**
		Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.		**Presentase**		**37.79**	**37.79**	**100%**	**38.12**	**0**	**37.79**	**#DIV/0!**
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	50	Orang	10	11	11	100%	10	0	21	42%
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya**		**Presentase**		**47.58**	**52.06**	**109%**	**53.77**	**0**	**52.06**	**#DIV/0!**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar**		**Presentase**		**2,373**	**2,096**	**88.33%**	**72.35**	**0**	**2096**	**#DIV/0!**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	3,145	Orang	587	527	355	67%	441	441	1383	44%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	1,075	Orang	374	267	267	100%	283	0	641	60%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu	0	Orang	79	79	79	100%	79	75	233	#DIV/0!
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota	330	Orang	66	66	66	100%	66	0	132	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	2,925	Orang	508	548	605	110%	285	285	1398	48%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,770	Orang	251	286	224	78.32%	127	0	475	27%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota	500	Orang	50	100	100	100%	100	0	150	30%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	350	Orang	36	100	100	100%	70	0	136	39%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	100	Orang	20	100	100	100%	100	0	120	120%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	500	Orang	100	100	100	100%	100	0	200	40%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	100	Orang	30	50	50	100%	20	0	80	80%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota	100	Orang	40	50	50	100%	20	0	90	90%
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan**		**Presentase**				**#DIV/0!**	**35.19**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang	50	50	50	100%	50	0	100	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	500	Orang	100	75	75	100%	100	0	175	35%
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	20	Orang	0	0	0	#DIV/0!	4	0	0	0%
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	10	20	20	100%	20	0	30	60%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	520	Orang	87	92	50	54%	104	0	137	26%
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	15	0	0	#DIV/0!	15	0	15	20%
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	100	Orang	20	0	0	#DIV/0!	20	0	20	20%
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	375	Orang	75	2	2	100%	75	0	77	21%
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi**		**Presentase**		**69.94%**	**74.83%**	**106.99%**	**100**	**0**	**0.7483**	**#DIV/0!**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani**		**Presentase**		**11,932**	**15,869**	**133%**	**85.68**	**0**	**15869**	**#DIV/0!**
		Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi				**350,000**	**255,075**	**73%**		**0**	**255075**	**#DIV/0!**
1.06.05.2.02.001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data	840000	KFM	137,082	50,000	49,730	99%	50	36	186848	22%
1.06.05.2.02.002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	1,775,135	KPM	258,684	300,000	205,345	68%	150	46	464075	26%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						#DIV/0!	174	0	0	#DIV/0!
1.06.05.2.02.006	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	4,125	KPM	580	11,932	15,869	133%	5,943	0	16449	399%
1.06.06	**PROGRAM PENANGAN BENCANA**	**Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.**		**Presentase**				**#DIV/0!**	**79.28**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS**		**Presentase**				**#DIV/0!**	**13.23**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25,750	Orang	5000	5000	7881	158%	5000	1516	14397	56%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang	100	100	100	100%	100	0	200	40%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota	500	Orang	130	100	100	100%	340	0	230	46%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang	590	530	200	37.74%	100	0	790	158%
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih**		**Presentase**				#DIV/0!	73.52	0	0	#DIV/0!
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Desa/ Kampung	1	1	1	100%	2	0	2	20%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Sisga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota	430	Orang	86	86	86	100%	86	0	172	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)= '(7/6)	(9)	(10)	(11)= '(5+7+10)	(12)= "(11/4)
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif**		**Presentase**	**70**	**70**	**70**	**100%**	**80**	**0**	**140**	**#DIV/0!**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**		**Presentase**	**70**	**70**	**70**	**100%**	**70**	**0**	**140**	**#DIV/0!**
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	0	2	40%
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	10	Makam	2	2	2	100%	2	0	4	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024

Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2024, realisasi keuangan mencapai 94,17% sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2024, berdasarkan hasil penetapan pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah), Review hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Adapun realisasi program dan kegiatan semuanya dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2024, yakni pencapaian rata-rata diatas 100%, yaitu:

- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 100,00% dimana hal ini dikarenakan realisasi anggaran sangat unprediktable karena menyangkut dengan warga Kabupaten Bandung yang berdomisili di luar Kabupaten Bandung yang bermasalah dan atau menimnggal dunia.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 104,00%
- Program Pemberdayaan Sosial sebesar 91.09 %
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar 106,99%
- Program Penanganan Bencana 102,22%
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%
- Program Rehabilitasi Sosial 109,42%.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peersentase Keluarga Fakir Miskin (KFM) yang meningkat produtivitasnya secara sosial dan ekonomi			46.92 %	55.58 %	64.21 %	73.05 %	46.92 %	74.83 %	64.21 %	73.05 %	
2	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Defenisi Operasional : Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Indikator Kinerja Kunci (out Come) : Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat **Rumus Perhitungannya :** Indikator Kinerja = X x 100 % Y keterangan : X = Jumlah KBA/S yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya. Y = Populasi KBA/S Yang membutuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	50.96 %	70.37 %	75.87 %	81.90 %	50.96 %	71.93 %	75.87 %	81.90 %	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapat permakanan	5000	5000	5600	5595	5000	5000	5600	5595	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Korban bencana yang menerima paket Sandang	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki									
		Penangan khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Penyelenggaraan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	530	530	530	530	530	530	530	530	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan (PM-KT) yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal			37,46 %	37,79 %	38,12 %	38,45 %	37,46 %	37,79 %	38,12 %	38,45 %	
4	Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian Sosialnya	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Defenisi Operasional : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan dan pengemis. Indikator Kinerja Kunci (out Come): Persentase penyangdang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **Rumus Perhitungan nya :** 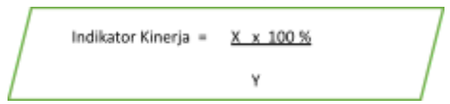 Keterangan : X = Jumlah PD,AT,LUT dan GEPENG yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi PD,AT,LUT dan GEPENG yang membutuhan Rehabilitasi	40.50 %	42.69%	45.95%	50.62%	52.06 %	44.93%	45.95%	50.62%	
		Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	20	20	20	20	20	20	20	20	
		layanan Kedaruratan	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	629	629	629	629	629	629	629	629	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima paket Sandang	215	215	215	215	215	215	215	215	
		Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas twerlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang memanfaatkan alat bantu	79	79	79	79	79	79	79	79	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlagh Paket perbekalan kesehatan yang tersedia	20	20	20	20	20	20	20	20	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Pemberian Bimbingan Fisik,mental, spiritual dan sosial	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapat bimbingan fisik, mentas dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Siggah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	585	585	585	585	585	585	585	585	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Geladangan pengemis.	Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat	354	354	354	354	354	354	354	354	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor induk Kependudukan, akta kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapat dokumen kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehataran dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	70	70	70	70	70	70	70	70	
		Pemberian layanan Penelusuran keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran Keluarga	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Pemberian layanan Reunifikasi keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang di Reunifikasi dengan Keluarga	66	66	66	66	66	66	66	66	
		Layanan Rujukan	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang dirujuk	20	20	20	20	20	20	20	20	
5	Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			43.74 %	50,11 %	53,98 %	53,98 %	43.74 %	45.65 %	53,98 %	53,98 %	
6	Prosentase taman Makam Pahlawan yang Representatif			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melayani Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Keterlantaran; dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Tuna Sosial; mempunyai wilayah jangkauan se-Kabupaten Bandung yaitu 31 Kecamatan, dengan daya tampung masing-masing tidak lebih dari 80 orang, tentunya hal ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah agar dapat merespon permasalahan-permasalahan social yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Merujuk pada standard pelayanan minimal yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis terlantar, maka dengan kondisi unit pelaksana teknis daerah yang ada di Dinas Sosial saat ini penting dilakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yaitu :

1. Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) yang melayani Eks. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
2. Rumah Perlindungan dan Trauma Center

   Hal ini penting segera dilaksanakan mengingat Dinas Sosial Kabupaten harus menerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kabupaten/kota yang tidak lagi memiliki keluarga atau terlantar.

2.3.1 Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Kabupaten Bandung secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi Masyarakat, mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematik untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam kebijakan terkait kebencanaan di Kabupaten Bandung, kebijakan, sumber daya manusia, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

2.3.2 Peningkatan Kualitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Methode Proxy- Mean Testing (PMT). Data ini sangat penting fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sehingga koordinasi pengelolaannya perlu dilakukan bersinergi dengan setiap Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung.

Saat ini pemanfaatan data terpadu tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas Sosial maupun instansi lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih dilihat sebatas hanya terkait dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat. Basis data terpadu ini belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

2.3.3 Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kunci kesuksesan program-program kesejahteraan sosial dari Dinas sosial ada pada sumber daya manusia, program-program kesejahteraan sosial harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri dari Tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial; relawan sosial; dan penyuluh Sosial. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompetensi. Saat ini belum semua sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung mendapat

sertifikasi, hal ini menjadi prioritas kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk mengupayakan proses sertifikasi tersebut. Kelembagaan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelembagaan sosial ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan bidang sosial.

2.3.4. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.

Integrasi layanan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program. Hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan sosial secara terpadu. Sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati. Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Kabupaten Bandung juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bandung lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga layanan Kesejehteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada permasalahan mendasar.

Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

- ✔ Wilayah Kabupaten Bandung yang sangat luas, mencakup dataran rendah dan dataran tinggi. Dimana masing- masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang

luas juga mempengaruhi persebaran bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah.

- ✔ Kabupaten Bandung juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Kabupaten Bandung terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Kabupaten Bandung. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi Masyarakat.
- ✔ Program-program penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat bergantung pada pemerintah Kabupaten, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.
- ✔ Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan sangat komplek dalam penanganannya.

2.3.5. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem informasi kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait potensi sumber

kesejahteraan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta capaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung, sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan secara berkesinambungan. Pemanfaatan informasi kesejahteraan sosial oleh pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun instansi lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial belum dimanfaatkan secara menyeluruh sehingga sulit mengukur keberhasilan program yang diberikan oleh instansi tersebut.

2.3.6. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi

Anak merupakan seorang individu yang membutuhkan perlindungan dikarenakan masih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Keluarga sebagai bagian terdekat dengan anak merupakan tempat tumbuh dan kembang anak. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup.

Dalam prosesnya pelaksanaan program perlidungan anak membutuhkan pusat-pusat layanan dan rehabilitasi bagi proses pemulihan dan perlindungan anak-anak yang mengalami penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Keluarga sebagai sistem yang terdekat dengan anak juga membutuhkan penguatan dan pemberdayaan agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pengasuhan dan pelayanan bagi anak. Disisi lain, melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarganya. Keterlibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga

dalam membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk lebih cepat keluar dari masalahnya dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Pelayanan kesejahteraan bidang sosial bagi yang diberikan kepada anak harus bisa dilakukan secara sistemik agar layanan yang diberikan berimplikasi positif dan bermanfaat pada tumbuh kembang anak. Sangat besar kemungkinan bagi yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung (RKPD) dan hasil analisis kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan bidang sosial pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut : PAGU Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan yakni : Rp. 43.293.807.983,- (empat puluh tiga milyar duaratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh tiga rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp.40.769.127.543,- (empat puluh milyar tujuh ratus enampuluh sembilan juta seratus duapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh tiga rupiah),- atau 94,17% (sembilan empat koma satu tujuh), ini sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.524.680.440,- (dua milyar Limaratus duapuluh empat juta enamratus Delapanpuluh ribu Empat ratus empatpuluh empat rupiah),- atau 5,83% (lima koma delapan tiga persen). yakni terdiri atas:

- Belanja Operasi : Rp. 30.560.488.866,-
- Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 9.249.144.910,-
- Belanja Modal : Rp. 959.493.767,-

Rp. 40.769.127.543-

untuk lebih jelas sebaran pagu anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2.3.
Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Dilakukan Perubahan Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
01	02	03	04
	Dinas Sosial		**43.293.807.983,00**
P	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		**14,502,156,536.00**
K	Perencanaan,Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**99.318.600**
SK		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.233.600,00
SK		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	525.000,00
			525.000,00
SK		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	525.000,00
SK		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510.000,00
K	Administrasi Keuanga Perangkat Daerah		**10.008.411.247**
SK		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.008.411.247
K	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. -
SK		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. -
K	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**856,010,790.00**
SK		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19,245,490.00
SK		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309,039,300.00
SK		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,816,000.00
SK		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,334,300.00
SK		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	122,480,000.00
SK		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,998,400.00
SK		Penyediaan Bahan/ Material	34,608,000.00
SK		Fasilitasi Kunjungan Tamu	150,000,000.00
SK		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,900,000.00

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
SK		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20,589,300.00
K	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**195,585,000.00**
SK		Pengadaan Mebel	195,585,000.00
SK		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
K	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**2,262,441,899.00**
SK		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,850,000.00
SK		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290,908,015.00
SK		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,965,683,884.00
K	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1,080,389,000.00**
SK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	42,330,000.00
SK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319,695,000.00
SK		Pemeliharaan Mebel	Rp. -
SK		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,430,000.00
SK		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	498,934,000.00
SK		Pemeliharaan/Rehabiitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	120,000,000.00
P	Program Pemberdayaan Sosial		Rp. -
K	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Rp. -
SK		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp. -
K	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/ Kota		**5.248.223.360.oo**
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.113.575.740,oo
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/kota	. 425.353.740.,oo
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	2.539.484.940,oo
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	. 1.169.808.940.oo

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
		Kewenangan Kabupaten/Kota	
SK		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan LK3	Rp. -
P	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		**43.708.100.oo**
K	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan Ke Desa/ Kelurahan Asal		**43.708.100.oo**
SK		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di DaerahKabupaten/kota untuk dipulangkan Ke Desa/ Kelurahan Asal	43.708.100.oo
P	Program Rehabilitasi Sosial		**7.154.426.476,oo**
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		**6.399.786.971.oo**
SK		Penyediaan Permakanan	1.188.000.000,oo
SK		Penyediaan Sandang	894.450.000,oo
SK		Penyediaan Alat Bantu	255.069.300,oo
SK		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.140.000,oo
SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.534.859.500.oo
SK		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.033.980.000.oo
SK		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.	6.580.000.oo
SK		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.180.000,oo
SK		Pemberian Layanan data dan Pengadunan	24.750.000,oo
SK		Pemberiaan Layanan kedaruratan	557.098.171.oo
SK		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.500.000,oo
SK		Pemberian layanan Rujukan	9.860.000.oo
K	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahtweraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**754.639.505,oo**
SK		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	24.750.000,oo

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
SK		Pemberian Layanan Kedaruratan	116.251.345.oo
SK		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4.499.500,oo
SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	607.418.660.oo
SK		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. -
SK		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. -
SK		Pemberian Layanan Dukungan Rujukan	. 1.720.000.oo
P	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		**14.057.576.417.oo**
K	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota		**14.057.576.417.oo**
SK		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	888.220.000.oo
SK		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota	450.257.115.oo
SK		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12.753.419.302.oo
P	Program Penangan Bencana		**2.054.319.690.oo**
K	Peerlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**1.573.996.690.oo**
SK		Penyediaan Permakanan	852.734.890.oo
SK		Penyediaan Sandang	275.600.000.oo
SK		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	251.109.000.oo
SK		Pelayanan Dukungan Psikososial	194.552.800.oo
K	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan Bencana Kab/Kota		**480.323.000.oo**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	30.000.000.oo
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana	450.323.000.oo
P	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		**83.397.404.oo**
K	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		**83.397.404.oo**
SK		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	83.397.404.oo
SK		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	48.300.000.oo
SK		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	35.097.404.oo

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**Rp 41.823.036.020,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**Rp 44.745.853.556,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**-Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**78,50**	**Rp 17.059.280.134,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**78,50**	**Rp 16.114.302.513,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 207.323.558,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 79.211.800,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah	2 Dokumen	Rp 107.490.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah	2 Dokumen	Rp 74.501.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 6.031.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 420.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 6.129.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 430.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Rp 6.031.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Rp 1.290.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8 Dokumen	Rp 66.858.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8 Dokumen	Rp 420.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Rp 9.000.000,00					Rp 1.290.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				Rp 3.783.158,00					Rp 860.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 11.666.627.871,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 10.874.665.972,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 11.666.627.871,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 10.874.665.972,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 153.083.300,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp. 136.912.300,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Wil. Pemda		75 Stel	Rp 75.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Wil. Pemda		75 Stel	Rp 74.779.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	65 Orang	Rp 78.083.300,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	65 Orang	Rp 62.133.300,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 850.479.284,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 728.023.300,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan	26 Jenis	Rp 50.148.100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan	26 Jenis	Rp 48.452.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Jenis 70 Jenis	Rp 355.511.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Jenis 70 Jenis	Rp 355.511.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	34 Jenis	Rp 25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	34 Jenis	Rp -	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	6 Jenis	Rp 20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	6 Jenis	Rp 20.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	19 Jenis	Rp 78.760.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	19 Jenis	Rp 68.905.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	19 Jenis	Rp 20.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	19 Jenis	Rp 19.958.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan	2 Jenis	Rp 44.830.464,00	Penyediaan Bahan/Material	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan	2 Jenis	Rp 44.540.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wil. Pemda	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	159 Orang	Rp 75.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wil. Pemda	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	159 Orang	Rp 110.041.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Orang	Rp 121.231.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Orang	Rp 60.615.500,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp 60.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 3.284.062.241,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 3.383.419.241,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2 Jenis	Rp 5.855.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2 Jenis	Rp 5.855.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	Rp 255.978.965,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	Rp 287.015.965,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	Rp 3.052.288.278,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	Rp 3.110.548.278,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp 171.492.900,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp 171.492.900,00**	
	Pengadaan Mebel	Semua Wil. Pemda	Jumlah paket Mebel yang disediakan	9 Jenis	Rp 171.492.900,00	Pengadaan Mebel	Semua Wil. Pemda	Jumlah paket Mebel yang disediakan	9 Jenis	Rp 171.492.900,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan	3 Paket	Rp 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan	3 Paket	Rp -	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp 826.211.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp 740.577.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Rp 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Rp -	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Rp 301.876.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Rp 216.242.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Semua Wil. Pemda	Jumlah Mebel yang dipelihara	12 Jenis	Rp 0	Pemeliharaan Mebel	Semua Wil. Pemda	Jumlah Mebel yang dipelihara	12 Jenis	Rp -	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Rp 73.320.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Rp 73.320.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	Rp 451.015..000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	Rp 451.015.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp -	
	Jumlah 1				**Rp 17.159.280.134,00**					**Rp 16.114.302.513,00**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi**	**100,00%**	**Rp 9.900.579.100,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi**	**100,00%**	**Rp 14.185.685.600,00**	
		Semua Wil. Pemda	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani**	**68,79%**			Semua Wil. Pemda	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani**	**68,79%**		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi**		**Rp 9.900.579.100,00**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi**		**Rp 14.185.685.600,00**	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data	1 Dokumen	Rp 2.206.282.300,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data	1 Dokumen	Rp 1.744.710.000,00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	355.027 KFM	Rp 224.361.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	355.027 KFM	Rp 267.840.000,00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	825 Orang	Rp 6.145.229.600,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	825 Orang	Rp 11.041.478.200,00	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyaraka	Semua Wil. Pemda			Rp 1.324.706.200,00		Semua Wil. Pemda			Rp 1.131.657.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.**	**72,03%**	**Rp 2..455.611.900.,00**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.**	**72,03%**	**Rp 2.687.892.200,00**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS**	**44,07%**	**Rp 1.905.090.900,00**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS**	**44,07%**	**Rp 2.162.221.300,00**	
	Penyediaan Makanan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	Rp 769.280.000,00	Penyediaan Makanan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	Rp 1.164.276.400,00	
	Penyediaan Sandang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 375.600.000,00	Penyediaan Sandang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 375.596.400,00	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota	100 Orang	Rp 285.669.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota	100 Orang	Rp 265.575.900,00	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 474.541.900,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 356.772.600,00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih**	**100,00%**	**Rp 550.521.000,00**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih**	**100,00%**	**Rp 525.670.900,00**	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	Rp 163.865.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	Rp 144.973.000,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota	86 Orang	Rp 386.658.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota	86 Orang	Rp 380.697.900,00	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal**	**100,00%**	**Rp 50.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal**	**100,00%**	**Rp 38.984.400,00**	
		Semua Wil. Pemda	**Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**37,79%**			Semua Wil. Pemda	**Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**37,79%**	Rp -	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.**	**37,79%**	**Rp 50.000.000,00**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.**	**37,79%**	Rp 38.984.400,00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Semua Wil. Pemda	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	10 Orang	Rp 50.000.000,00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Semua Wil. Pemda	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	10 Orang	Rp 38.984.400,00	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya**	**59,21%**	**Rp 7.563.599.771,00**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya**	**59,21%**	**Rp 7.604.670.270,00**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar**	**79,32%**	**Rp 6.926.445.561,00**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar**	**79,32%**	**Rp 7.079.519.525,00**	
	Penyediaan Permakanan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	629 Orang	Rp 1.5.62.488.750,00	Penyediaan Permakanan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	629 Orang	Rp 1.561.126.750,00	
	Penyediaan Sandang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang	Rp 1.477.594.200,00	Penyediaan Sandang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang	Rp 1.473.155.000,00	
	Penyediaan Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu	79 Orang	Rp 265.980.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu	79 Orang	Rp 555.685.500,00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota	66 Orang	Rp 4.770.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota	66 Orang	Rp 2.140.000,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	585 Orang	Rp 2.214.133.635,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	585 Orang	Rp 2.008.148.095,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	354 Orang	Rp 900.299.040,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	354 Orang	Rp 862.448.620,00	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota	100 Orang	Rp 3.430.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota	100 Orang	Rp 1.700.000,00	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Rp 16.720.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Rp 8.550.000,00	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	1 Dokumen	Rp 2.940.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	1 Dokumen	Rp 1.190.000,00	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	100 Orang	Rp 454.919.336,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	100 Orang	Rp 586.045.560,00	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	20 Orang	Rp 7.700.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	20 Orang	Rp 3.850.000,00	
	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 25.472.600,00	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 15.480.000,00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan**	**39,09%**	**Rp 637.154.210,00**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan**	**39,09%**	**Rp 525.150.745,00**	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 0,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 0	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	100 Orang	Rp 124.330.210,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	100 Orang	Rp 124.311.345,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	4 Jenis	Rp -	Penyediaan Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	4 Jenis	Rp -	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Jenis	Rp 8.700.000,00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Jenis	Rp 8.693.000,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	104 Orang	Rp 461.219.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	104 Orang	Rp 378.851.400,00	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 19.800.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 5.425.000,00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 3.570.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 3.570.000,00	
	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Rp 19.800.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Rp 4.300.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos**	**50,11%**	**Rp 4.598.737.380,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos**	**50,11%**	**Rp 4.019.260.838,00**	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial**	**41,67**	**Rp 25.281.500,00**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Wil. Pemda**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial**	**41,67**	**Rp 11.841.500,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	50 Orang	Rp 25.281.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	50 Orang	**Rp 11.841.500,00**	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial**	**58,56%**	**Rp 4.573.455.880,00**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial**	**58,56%**	**Rp 4.007.419.338,00**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	786 Orang	Rp 1.496.277.280,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	786 Orang	Rp 1.680.015.148,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota.	31 Orang	Rp 211.018.900,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota.	31 Orang	Rp 360.768.900,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota	571 Orang	Rp 416.830.540,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota	571 Orang	Rp 160.870.190,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	339 Orang	Rp 2.403.123.160,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	339 Orang	Rp 1.763.374.800,00	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Semua Wil. Pemda	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi.	5 Lembaga	Rp 46.206.000,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Semua Wil. Pemda	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi.	5 Lembaga	Rp 42.390.300,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif**	**70,00%**	**Rp 95.277.735,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif**	**70,00%**	**Rp 95.057.735,00**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**70,00%**	**Rp 95.277.735,00**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Semua Wil. Pemda**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**70,00%**	**Rp 95.057.735,00**	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 48.813.000,00	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 48.813.000,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	Rp 46.414.735,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	Rp 46.244.735,00	
	Jumlah 2				**Rp 24.663.757.886,00**					**Rp 28.631.551.043,00**	
	Jumlah Total				**Rp 41.823.036.020,00**					**Rp 44.745.853.556,00**	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya**		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		**Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar**	951	
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	238	
	Musrembang			**224**	
	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	Kec. Arjasari		2 Orang	
		Kec. Banjaran		17 orang	
		Kec. Cangkuang		6 Orang	
		Kec. Cicalengka		7 Orang	
		kec. Cikancung		1 Orang	
		Kec. Cilerngkrang		11 Orang	
		Kec. Cilenyi		1 Orang	
		Kec. Cimaung		16 Orang	
		Kec. Cimenyan		5 Orang	
		Kec. Ciparay		5 Orang	
		Kec. Ciwidey		3 Orang	
		Kec. Dayehkolot		8 Orang	
		Kec. Ibun		1 Orang	
		Kec. Katapang		10 Orang	
		Kec. Kertasari		13 Orang	
		Kec. Kutawaringin		12 Orang	
		Kec. Majalaya		2 Orang	
		Kec. Margaasih		1 Orang	
		Kec. Margahayu		15 Orang	
		Kec.Nagreg		8 Orang	
		Kec. Pacet		5 Orang	
		Kec. Pameungpeuk		12 Orang	
		Kec. Pangalengan		6 Orang	
		Kec. Paseh		7 Orang	
		Kec. Pasir Jambu		16 Orang	
		Kec. Rancaekek		17 orang	
		Kec. Solokanjeruk		9 Orang	
		Kec. Soreang		8 Orang	
	E- Pokir			**14**	
		Kec. Arjasari		2 Orang	
		Kec. Banjaran		2 Orang	
		Kec. Cimaung		2 Orang	
		Ken Margaasih		8 Orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyedian Sandang		Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	134	
	Musrembang			**116**	
	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	Kec. Bojongsoang		5 Orang	
		Kec. Cicalengka		6 Orang	
		Kec. Cikancung		1 Orang	
		Kec. Cilengkrang		6 Orang	
		Kec. Cilenyi		5 Orang	
		Kec. Cimenyang		3 Orang	
		Kec. Ciparay		8 orang	
		Kec. Ciwidey		8 orang	
		Kec. Dayeuhkolot		2 Orang	
		Kec. Ibun		1 Orang	
		Kec. Kutawaringin		5 Orang	
		Kec. Majalaya		3 Orang	
		Kec. Margaasih		2 Orang	
		Kec. Margahayu		19 Orang	
		Kec. Pacet		2 Orang	
		Kec. Pangalengan		11 Orang	
		Kec. Paseh		12 Orang	
		Kec. Pasirjambu		2 Orang	
		Kec. Rancabali		6 Orang	
		Kec. Rancaekek		2 Orang	
		Kec. Solokan Jeruk		6 Orang	
		Kec. Soreang		2 Orang	
	E- Pokir			**18**	
		Kec. Cangkunang		1 Orang	
		Kec. Cimaung		3 Orang	
		Kec. Margaasih		5 Orang	
		Kec. Pangalengan		9 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		**Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota**	**283**	
	Musrembang			**234**	
		Kec. Arjasari		2 Orang	
		Kec. Baleendah		11 Orang	
		Kec. Banjaran		7 Orang	
		Kec. Bojongsoang		6 Orang	
		Kec. Cangkuang		8 Orang	
		Kec. Cicalengka		3 Orang	
		Kec. Cikancung		6 Orang	
		Kec. Cilengkrang		2 Orang	
		Kec. Cilenyi		16 Orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec. Cimaung		8 Orang	
		Kec. Cimenyang		10 Orang	
		Kec. Ciparay		15 Orang	
		Kec. Ciwidey		4 Orang	
		Kec. Dayeuhkolot		6 Orang	
		Kec. Ibun		9 Orang	
		Kec. Katapang		16 Orang	
		Kec. Kertasari		5 Orang	
		Kec. Kutawaringin		7 Orang	
		Kec. Majalaya		10 Orang	
		Kec. Margaasih		5 Orang	
		Kec. Margahayu		1 Orang	
		Kec. Nagreg		9 Orang	
		Kec. Pacet		2 Orang	
		Kec. Pameungpeuk		4 Orang	
		Kec. Pangalengan		8 Orang	
		Kec. Paseh		6 Orang	
		Kec. Pasirjambu		3 Orang	
		Kec. Rancabali		4 Orang	
		Kec. Rancaekek		20 Orang	
		Kec. Solokan Jeruk		9 Orang	
		Kec. Soreang		12 Orang	
	E- Pokir			**49**	
		Kec. Arjasari		2 Orang	
		Kec. Baleendah		12 Orang	
		Kec. Banjaran		7 Orang	
		Kec. Cangkuang		1 Orang	
		Kec. Cileunyi		4 Orang	
		Kec. Cimaung		1 Orang	
		Kec. Ciparay		4 Orang	
		Kec. Ciwidey		6 Orang	
		Kec. Katapang		7 Orang	
		Kec. Margahayu		1 Orang	
		Kec. Rancabali		1 Orang	
		Kec. Soreang		3 Orang	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**96**	
	Musrembang			**96**	
		Kec. Arjasari		4 Orang	
		Kec. Baleendah		1 Orang	
		Kec. Banjaran		1 Orang	
		Kec. Bojongsoang		1 Orang	
		Kec. Cicalengka		1 Orang	
		Kec. Cikancung		3 Orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec. Cilengrang		2 Orang	
		Kec. Cileunyi		9 Orang	
		Kec. Cimenyan		1 Orang	
		Kec. Ciparay		12 Orang	
		Kec. Dayeuhkolot		8 Orang	
		Kec. Ibun		2 Orang	
		Kec. Kertasari		2 Orang	
		Kec. Kutawaringin		9 Orang	
		Kec. Majalaya		4 Orang	
		Kec. Margaasih		1 Orang	
		Kec. Nagreg		1 Orang	
		Kec. Pacet		6 Orang	
		Kec. Pameungpeuk		2 Orang	
		Kec. Pangalengan		10 Orang	
		Kec. Paseh		4 Orang	
		Kec. Pasirjambu		2 Orang	
		Kec. Rancabali		2 Orang	
		Kec. Rancaekek		3 Orang	
		Kec. Solokanjeruk		2 Orang	
		Kec. Soreang		3 Orang	
	E- Pokir			**0**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi**	**256**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi**	**256**	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	**94**	
	Musrembang			**73**	
		Kec. Arjasari		4 Kelompk	
		Kec. Baleendah		2 Kelompok	
		Kec. Banjaran		2 Kelompok	
		Kec. Bojongsoang		2 Kelompok	
		Kec. Cangkuang		1 Kelompok	
		Kec. Cicalengka		3 Kelompok	
		Kec. Cikancung		3 Kelompok	
		Kec. Cilengkrang		2 Kelompok	
		Kec. Cileunyi		3 Kelompok	
		Kec. Cimaung		2 Kelompok	
		Kec. Cimenyan		3 Kelompok	
		Kec. Ciwidey		1 Kelompok	
		Kec. Dayeuhkolot		1 Kelompok	
		Kec. Ibun		4 Kelompk	
		Kec. Katapang		2 Kelompok	
		Kec. Kertasari		3 Kelompok	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kec. Kutawaringin		1 Kelompok	
		Kec. Majalaya		3 Kelompok	
		Kec. Margaasih		3 Kelompok	
		Kec. Nagreg		3 Kelompok	
		Kec. Pacet		5 Kelompok	
		Kec. Pameungpeuk		2 Kelompok	
		Kec. Pengalengan		5 Kelompok	
		Kec. Paseh		3 Kelompok	
		Kec. Pasirjambu		6 Kelompok	
		Kec. Rancabali		2 Kelompok	
		Kec. Soreang		2 Kelompok	
	E- Pokir			**21**	
		Kec. Baleendah		6 Kelompok	
		Kec. Banjaran		2 Kelompok	
		Kec. Ciparay		7 Kelompok	
		Kec. Cileunyi		1 Kelompok	
		Kec. Kertasari		2 Kelompok	
		Kec. Pacet		1 Kelompok	
		Kec. Pasir Jambu		3 Kelurahan	
		Kec. Soreang		2 Kelompok	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			**162**	
	Musrembang			**111**	
		Kec. Baleendah		5 Orang	
		Kec. Banjaran		4 Orang	
		Kec. Bojongsoang		2 Orang	
		Kec. Cangkuang		12 Orang	
		Kec. Cikancung		6 Orang	
		Kec. Cileunyi		3 Orang	
		Kec. Cimaung		9 orang	
		Kec. Ciparay		1 Orang	
		Kec. Ciwidey		6 Orang	
		Kec. Dayeuhkolot		2 Orang	
		Kec. Ibun		1 Orang	
		Kec. Kertasari		3 Orang	
		Kec. Kutawaringin		4 Orang	
		Kec. Majalaya		1 Orang	
		Kec. Margasih		2 Orang	
		Kec. Nagreg		3 Orang	
		Kec. Pacet		2 Orang	
		Kec. Pameungpeuk		1 Orang	
		Kec. Paseh		17 Orang	
		Kec. Pasir Jambu		1 Orang	
		Kec. Rancabali		2 Orang	
		Kec. Rancaekek		10 Orang	
		Kec. Solokan Jeruk		12 Orang	
		Kec. Soreang		2 Orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	E- Pokir			**51**	
		Kec. Baleendah		6 Orang	
		Kec. Banjaran		7 Orang	
		Kec. Cikancung		4 Orang	
		Kec. Cileunyi		2 Orang	
		Kec. Cimaung		2 Orang	
		Kec. Cimenyan		3 Orang	
		Kec. Ciparay		6 Orang	
		Kec. Dayeuhkolot		2 Orang	
		Kec. Katapang		1 Orang	
		Kec. Majalaya		5 orang	
		Kec. Margahayu		1 Orang	
		Kec. Nagreg		1 Orang	
		Kec. Pacet		4 Orang	
		Kec. Pangalengan		1 Orang	
		Kec. Pasirjambu		4 Orang	
		Kec. Rancaekek		1 Orang	
		Kec. Soreang		1 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung 2025

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial, selaras dengan perubahan dinamika sosial, kondisi aktual di lapangan, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

a. Tujuan

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung seperti: orang miskin, anak-anak terlantar dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel) serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Sasaran

Dalam Rencana Pembangunan 2025 – 2029 membidik tiga sasaran

utama pembangunan nasional, yaitu *penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.* Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029.

Sementara itu, pencapaian sasaran RPJMD diukur menggunakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berfungsi sebagai indikator spesifik dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian misi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

Berdasarkan hal tersebut, sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); baik individu, keluarga maupun masyarakat.
2. Pihak swasta, organisasi sosial dan masyarakat yang aktif melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta perguruan tinggi.
3. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Petugas Sosial di Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, dan lain-lain).

3.2. Kebijakan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sasaran Strategis yang akan dicapai Kementrian Kooordinator Pemberdayaan Manusia (KEMKO-PM) dalam lima tahun kedepan

mencakup peningkatan kualitas hidup, kemadirian sosial-ekonomi, dan tata kelola yang propesional. Adapun yang menjadi indikator kinerja meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan jumlah kelas menengah, perluasan jaminan sosial. Kemenko PM ingin mewujudkan negara kesejahteraan yang inklusif untuk memastikan keluarga miskin ekstrim, miskin dan rentan agar menjadi berdaya hingga naik kelas menjadi mandiri.

Fokus Kemenko PM yang merupakan kementrian baru dalam memperkuat koordinasi dari hulu kehilir untuk transpormasi kesejahteraan masyarakat "*Yaitu mencakup pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemeberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, peningkatan kelas UMKM dan Koperasi, pengembangan ekonomikreatif, hingga perlindungan tenaga kerja migran".* Isu ini mempertajam target Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan memegang peranan krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.3. Program Dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan standar pelayanan minimal yang belum dapat dicapai.

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang akan dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung, tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan korban bencana, perlindungan dan jaminan sosial, serta 2 (dua) Unit Pelaksana Tekhnis

Daerah (UPTD) maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel 3.3.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan
Tahun Anggaran 2025

PROG	KEG	SUB	PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN
1.06.01			DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG
1.06.01	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.01	2.01		Perencanaan,Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
1.06.01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan
1.06.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.06.01	2.06		Administrasi Umum Peragkat Daerah
1.06.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga
1.06.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material
1.06.01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
1.06.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
1.06.01	2.07	05	Pengadaan Mebel
1.06.01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
1.06.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01	2.08	02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

PROG	KEG	SUB	PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN
1.06.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
1.06.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizian Keendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel
1.06.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
1.06.01	2.09	09	Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
1.06.01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Pemberdayaan Sosial
			Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ kota
			Koordinasi dan Singkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahtweraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupatwen/Kota
			Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
			Program Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
			Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal
			Program Rehabilitasi Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahtweraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

PROG	KEG	SUB	PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Layanan Dukungan Rujukan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten /Kota
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Program Penangan Bencana
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
			Pelayanan Dukungan Psikososial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan Bencana Kab/Kota
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp. 44.745.853.556,00				
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik		78,50	Rp 16.114.302.513,00			79,50	11.956.329.300,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Semua Wil. Pemda	100%	Rp 79.211.800,00,00	APBD		100%	70.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah	Semua Wil. Pemda	2 Dokumen	Rp 74.501.800,00	APBD		2 Dokumen	50.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wil. Pemda	1 Dokumen	Rp 420.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Wil. Pemda	1 Dokumen	Rp 430.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Wil. Pemda	5 Dokumen	Rp 1.290.000,00	APBD		5 Dokumen	5.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Semua Wil. Pemda	8 Dokumen	Rp 420.000,00	APBD		8 Dokumen	5.000.000,00
										Rp 1.290.000,00				
										Rp 860.000,00				
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**Semua Wil. Pemda**	**100%**	**Rp 10.874.665.972,00**	**APBD**		**100%**	**10.064.875.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wil. Pemda	12 Bulan	Rp 10.874.665.972,00	APBD		12 Bulan	10.064.875.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**Semua Wil. Pemda**	**100%**	**Rp 136.912.300,00**	**APBD**		**100%**	**20.000.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Semua Wil. Pemda	75 Stel	Rp 74.779.000,00	APBD		75 Stel	-
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Wil. Pemda	65 Orang	Rp 62.133.300,00	APBD		65 Orang	20.000.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**Semua Wil. Pemda**	**100%**	**Rp 728.023.300,00**	**APBD**		**100%**	**135.649.300,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan	Semua Wil. Pemda	26 Jenis	Rp 48.452.100,00	APBD		26 Jenis	52.700.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Semua Wil. Pemda	21 Jenis 70 Jenis	Rp 355.511.700,00	APBD		21 Jenis 70 Jenis	10.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Semua Wil. Pemda	34 Jenis	Rp 0	APBD		34 Jenis	15.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Semua Wil. Pemda	6 Jenis	Rp 20.000.000,00	APBD		6 Jenis	20.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Semua Wil. Pemda	19 Jenis	Rp 68.905.00,00	APBD		19 Jenis	5.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	Semua Wil. Pemda	19 Jenis	Rp 19.958.000,00	APBD		19 Jenis	5.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan	Semua Wil. Pemda	2 Jenis	Rp 44.540.000,00	APBD		2 Jenis	5.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	Semua Wil. Pemda	159 Orang	Rp 110.041.000,00	APBD		159 Orang	7.949.300,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wil. Pemda	65 Orang	Rp 60.615.500,00	APBD		65 Orang	10.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Wil. Pemda	5 Dokumen	Rp 0	APBD		5 Dokumen	5.000.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**Semua Wil. Pemda**	**100%**	**Rp 171.492.900,00**	**APBD**		**100%**	**40.000.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Semua Wil. Pemda	9 Jenis	Rp 171.492.900,00	APBD		9 Jenis	20.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan	Semua Wil. Pemda	3 Paket	Rp 0	APBD		3 Paket	20.000.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**Semua Wil. Pemda**	**100%**	**Rp 3.383.419.241,00**	**APBD**		**100%**	**1.151.716.300,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Semua Wil. Pemda	2 Jenis	Rp 5.855.000,00	APBD		2 Jenis	5.855.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Semua Wil. Pemda	12 Bulan	Rp 267.015.965,00	APBD		12 Bulan	160.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Wil. Pemda	12 Bulan	Rp 3.110.546.276,00	APBD		12 Bulan	985.861.300,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**Semua Wil. Pemda**	**100%**	**Rp 740.577.000,00**	**APBD**		**100%**	**474.088.700,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Wil. Pemda	7 Unit	Rp 0	APBD		7 Unit	96.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Wil. Pemda	22 Unit	Rp 216.242.000,00	APBD		22 Unit	223.088.700,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Semua Wil. Pemda	12 Jenis	Rp 0	APBD		12 Jenis	5.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Semua Wil. Pemda	25 Unit	Rp 73.320.000,00	APBD		25 Unit	50.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Wil. Pemda	3 Unit	Rp 451.015.000,00	APBD		3 Unit	50.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Wil. Pemda	2 Unit	Rp 0	APBD		2 Unit	50.000.000,00
						Jumlah 1				**Rp 16.114.302.513,00**				**11.956.329.300,00**
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos**	**Semua Wil. Pemda**	**50,11%**	**Rp 4.019.260.838,00**	**APBD**		**53,98%**	**5.232.852.000,00**
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**2**	**2,02**	**0**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial**	**Semua Wil. Pemda**	**41,67**	**Rp 11.841.500,00**	**APBD**		**48,61**	**43.981.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	2	2,02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	Semua Wil. Pemda	50 Orang	Rp 11.841.500,00	APBD		50 Orang	43.981.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**2**	**2,03**	**0**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial**	**Semua Wil. Pemda**	**58,56%**	**Rp 4.007.419.338,00**	**APBD**		**59,35%**	**5.188.871.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	2	2,03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Semua Wil. Pemda	786 Orang	Rp 1.680.015.148,00	APBD		786 Orang	1.134.434.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	2	2,03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota.	Semua Wil. Pemda	31 Orang	Rp 360.768.900,00	APBD		31 Orang	333.100.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	2	2,03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	571 Orang	Rp 160.870.190,00	APBD		571 Orang	2.882.428.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	2	2,03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	339 Orang	Rp 1.763.374.800,00	APBD		339 Orang	790.679.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	2	2,03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi.	Semua Wil. Pemda	5 Lembaga	Rp 42.390.300,00	APBD		5 Lembaga	48.230.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal**	**Semua Wil. Pemda**	**100,00%**	**Rp 38.984.400,00**	**APBD**		**100,00%**	**50.000.000,00**
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**3**	**0**	**0**		**Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Semua Wil. Pemda	**37,79%**		APBD		**38,12%**	
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**3**	**2,01**	**0**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.**	**Semua Wil. Pemda**	**37,79%**	**Rp 38.984.400'00**	**APBD**		**38,12%**	**50.000.000,00**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	3	2,01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Semua Wil. Pemda	10 Orang	Rp 38.984.400,00	APBD		10 Orang	50.000.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya**	**Semua Wil. Pemda**	**59,21%**	**Rp 7.604.670.270,00**	**APBD**		**64,79%**	**4.640.347.410,00**
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**4**	**2,01**	**0**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar**	**Semua Wil. Pemda**	**79,32%**	**Rp 7.079.519.525,00**	**APBD**		**85,79%**	**3.914.648.410,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	629 Orang	Rp 1.561.126.750,00	APBD		629 Orang	785.156.750,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	215 Orang	Rp 1.473.155.000,00	APBD		215 Orang	746.750.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	79 Orang	Rp 555.685.500,00	APBD		79 Orang	265.625.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	66 Orang	Rp 2.140.000,00	APBD		66 Orang	15.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	585 Orang	Rp 2.008.148.095,00	APBD		585 Orang	1.053.052.160,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	354 Orang	Rp 862.448.620,00	APBD		354 Orang	778.240.500,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota	Semua Wil. Pemda	100 Orang	Rp 1.700.000,00	APBD		100 Orang	34.020.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	70 Orang	Rp 8.550.000,00	APBD		70 Orang	43.200.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Semua Wil. Pemda	1 Dokumen	Rp 1.190.000,00	APBD		1 Dokumen	31.350.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Semua Wil. Pemda	100 Orang	Rp 586.045.560,00	APBD		100 Orang	107.999.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Semua Wil. Pemda	20 Orang	Rp 3.850.000,00	APBD		20 Orang	25.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	20 Orang	Rp 15.480.000,00	APBD		20 Orang	29.255.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**4**	**2,02**	**0**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan**	**Semua Wil. Pemda**	**39,09%**	**Rp 525.150.745,00**	**APBD**		**43,80%**	**725.699.000,00**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	1 Dokumen	Rp 0	APBD		1 Dokumen	31.350.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Semua Wil. Pemda	100 Orang	Rp 124.311.345,00	APBD		100 Orang	102.760.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Semua Wil. Pemda	4 Jenis	Rp -	APBD		4 Jenis	50.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	20 Jenis	Rp 8.693.000,00	APBD		20 Jenis	14.900.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	104 Orang	Rp 378.851.400,00	APBD		104 Orang	482.739.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	15 Orang	Rp 5.425.000,00	APBD		15 Orang	15.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	20 Orang	Rp 3.570.000,00	APBD		20 Orang	14.050.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	4	2,02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	75 Orang	Rp 4.300.000,00	APBD		75 Orang	14.900.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi**	**Semua Wil. Pemda**	**100,00%**	**Rp 14.185.685.600,00**	**APBD**		**100,00%**	**2.517.754.200,00**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	5	0	0		Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	Semua Wil. Pemda	68,79%		APBD		85,68%	
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	5	2,02	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi	Semua Wil. Pemda		Rp 14.185.685.600,00	APBD			2.517.754.200,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	5	2,02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data	Semua Wil. Pemda	1 Dokumen	Rp 1.744.710.000,00	APBD		1 Dokumen	550.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	5	2,02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Semua Wil. Pemda	355.027 KFM	Rp 267.840.000,00	APBD		355.027 KFM	300.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	5	2,02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Semua Wil. Pemda	825 Orang	Rp 11.041.478.200,00	APBD		825 Orang	1.667.754.200,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	5	2,02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Semua Wil. Pemda	170 Orang	Rp 1.131.657.400,00	APBD			
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	0	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	Semua Wil. Pemda	72,03%	Rp 2.687.892.200,00	APBD		78,76%	2.729.720.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,01	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS	Semua Wil. Pemda	44,07%	Rp 2.162.221.300,00	APBD		46,26%	2.479.720.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	5000 Orang	Rp 1.164.276.400,00	APBD		5000 Orang	891.500.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca	Semua Wil. Pemda	100 Orang	Rp 375.596.400,00	APBD		100 Orang	275.600.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota	Semua Wil. Pemda	100 Orang	Rp 265.575.900,00	APBD		100 Orang	312.620.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	100 Orang	Rp 356.772.600,00	APBD		100 Orang	1.000.000.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**6**	**2,02**	**0**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih**	**Semua Wil. Pemda**	**100,00%**	**Rp 525.670.900,00**	**APBD**		**111,27%**	**250.000.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	90 Orang	Rp 144.973.000,00	APBD		90 Orang	150.000.000,00
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	6	2,02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	86 Orang	Rp 380.697.900,00	APBD		86 Orang	100.000.000,00
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**7**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif**	**Semua Wil. Pemda**	**70,00%**	**Rp 95.057.735,00**			**70,00%**	**100.000.000,00**
	6	**1.06.0.00.0.00.8..00**	**7**	**2,01**	**0**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**Semua Wil. Pemda**	**70,00%**	**Rp 95.057.735,00**			**70,00%**	**100.000.000,00**
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	7	2,01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	1 Dokumen	Rp 48.813.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6	1.06.0.00.0.00.8..00	7	2,01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	2 Makam	Rp 46.244.735,00	APBD		2 Makam	50.000.000,00
						Jumlah 2				**Rp 28.631.551.043,00**				**15.270.673.610,00**
						Jumlah Total				**Rp 44.745.853.556,00**				**27.227.002.910,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Dinas Sosial Kabupaten Bandung di tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.693.807.983- (Empat puuh tiga Milyar Enamratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan sartus delapan puluh tiga rupiah),- Terhadap rincian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung di tahun anggaran 2025 bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.5.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
7	8	9	10	**11**	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**-Nilai SAKIP -Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**78,50**	**Rp 15.052.156.536,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 79.211.800,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Perancanan Perangkat daerah	2 Dokumen	Rp 74.50.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 420.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Perubahamn RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 430.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Rp 1.290.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8 Dokumen	Rp 420.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Rp 1.290.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Semua Wil. Pemda	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	146 Data	Rp 860.000,00	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 10.874.665.972,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 10.874.665.972,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 136.912.300,00**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Wil. Pemda		75 Stel	Rp 74.779.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	65 Orang	Rp 62.133.300,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 728.023.300,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Komponen instalasi listri/ Penerangan Bangunan	26 Jenis	Rp 48.452.100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Jenis 70 Jenis	Rp 355.511.700,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	34 Jenis	Rp -	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	6 Jenis	Rp 20.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	19 Jenis	Rp 68.905.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	19 Jenis	Rp 19.958.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Semua Wil. Pemda	Jumlah Paket bahan / Material yang disediakan	2 Jenis	Rp 44.540.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wil. Pemda	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	159 Orang	Rp 110.041.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Orang	Rp 60.615.500,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp -	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp 171.492.900,00**	
Pengadaan Mebel	Semua Wil. Pemda	Jumlah paket Mebel yang disediakan	9 Jenis	Rp 171.492.900,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan	3 Paket	Rp -	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Nilai AKIP**	**100%**	**Rp 3.83.419.900,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2 Jenis	Rp 5.855.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	Rp 267.015.965,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Wil. Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	Rp 3.110.548.276,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase BMD/ASset dalam kondisi baik**	**100%**	**Rp 740.577.000,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Rp -	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Rp 216.242.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Semua Wil. Pemda	Jumlah Mebel yang dipelihara	12 Jenis	Rp -	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Rp 73.320.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	Rp 451.015.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wil. Pemda	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantorbatau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp -	
				Rp 16.114.302.513,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos**	**50,11%**	**Rp 4.019.260.838,00**	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditertibkanal, dan Pelaku yang mengikuti Kopetensi Pekerja Sosial**	**41,67**	**Rp 11.841.500,00**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	50 Orang	Rp 11.841.500,00	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial**	**58,56%**	**Rp 4.007.419.338,00**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapat Peniongkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	786 Orang	Rp 1.680.015.148,00	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota.	31 Orang	Rp 360.768.900,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota	571 Orang	Rp 160.870.190,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	339 Orang	Rp 1.763.374.800,00	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Semua Wil. Pemda	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi.	5 Lembaga	Rp 42.390.300,00	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal**	**100,00%**	**Rp 38.984.400,00**	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal. Prosentase (%) PM yang bermasalah yang mendapat layanan pemulangan ke daerah asal.**	**37,79%**	Rp 38.984.400,00	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Semua Wil. Pemda	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk DIpulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	10 Orang	Rp 38.984.400,00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya**	**59,21%**	**Rp 7.604.670.270,00**	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar**	**79,32%**	**Rp 6.079.519.525,00**	
Penyediaan Permakanan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	629 Orang	Rp 1.561.126.750,00	
Penyediaan Sandang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang	Rp 1.473.155.000,00	
Penyediaan Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu	79 Orang	Rp 555.685.500,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kabupaten/Kota	66 Orang	Rp 2.140.000,00	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	585 Orang	Rp 2.008.148.095,00	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Ge;landangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	354 Orang	Rp 862.448.620,00	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yangterpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabup[aten/Kota	100 Orang	Rp 1.700.000,00	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Rp 8.550.000,00	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	1 Dokumen	Rp 1.190.000,00	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	100 Orang	Rp 586.045.560,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	20 Orang	Rp 3.850.000,00	
Pemberian Layanan Rujukan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 15.480.000,00	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan**	**39,09%**	**Rp 525.150.745,00**	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp -	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	100 Orang	Rp 124.311.345,00	
Penyediaan Alat Bantu	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	4 Jenis	Rp -	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di luar panti	20 Jenis	Rp 8.693.000,00	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
		Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	104 Orang	Rp 378.851.400,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 5.425.000,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 3.570.000,00	
Pemberian Layanan Rujukan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Rp 4.300.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi**	**100,00%**	**Rp 14.185.685.600,00**	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) DTKS yang ter Verifikasi**		**Rp 14.185.685.600,00**	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yang di data	1 Dokumen	Rp 1.744.710.000,00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	355.027 KFM	Rp 287.840.000,00	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Wil. Pemda	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	825 Orang	Rp 11.041.478.200,00	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Wil. Pemda	umlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	174 Orang	Rp 1.131.657.400,00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.**	**72,03%**	**Rp 2.687.892.200,00**	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS**	**44,07%**	**Rp 2.162.221.300,00**	
Penyediaan Makanan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	Rp 1.164.276.400,00	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
Penyediaan Sandang	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 375.596.400,00	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang mendapatkan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupatemn/Kota	100 Orang	Rp 265.575.900,00	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Semua Wil. Pemda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 356.772.600,00	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih**	**100,00%**	**Rp 525.670.900,00**	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Wil. Pemda	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Perlengkapan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	Rp 144.973.000,00	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Semua Wil. Pemda	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan kabupaten/Kota	86 Orang	Rp 380.697.900,00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Semua Wil. Pemda**	**Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif**	**70,00%**	**Rp 95.057.735,00**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Semua Wil. Pemda**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**70,00%**	**Rp 95.057.735,00**	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemelaiharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 48.813.000,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Wil. Pemda	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	Rp 46.244.735,00	
				Rp 28.631.551.043,00	
				Rp 44.745.853.556,00	

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahamana.
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja Perubahan SKPD termasuk Dinas Sosial, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).
6. RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (REJA-P) Dinas Sosial Kabupaten Bandung tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

S U P A R D I A N

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA